

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MASJID AGUNG TERHADAP ALUN-ALUN KOTA MALANG

Subhan Ramdlani

Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik,
Brawijaya Malang, Indonesia
e-mail: ramdlani2000@yahoo.com

Universitas

Abstract

Identical to any inland cities in Java, Kota Malang also possesses an *alun-alun* in its downtown, completed with a Jami' Mosque on the west side. This composition clearly shows some features of capital city's typology in Java. Beside the similarity, some differences from the typology are also found in Alun-Alun Malang. The composition of Alun-Alun Kota Malang doesn't put the square as the main orientation of *pendopo* as the center of the government. Furthermore, the position and function of Jami' Mosque are dynamically follows the existence of Alun-alun Kota Malang which grows simultaneously with the city development. Thus research about the positional and functional relationships between the Jami' Mosque and the Alun-Alun needs to be held. A phenomenological approach is used for this research. Primary data is collected through interview with the users, analysts and observers of Alun-Alun in order to grasp an idea of their assumptions about the mosque's function. Meanwhile, the secondary data is attempted to obtain historical data of Alun-alun Kota Malang, including the establishment and the expansions of Jami' Mosque, especially when it became Grand Mosque of Kota Malang. The data were compared with the phenomenon which occurs at the moment, the desires and the needs of the user community, as well as the sustainability of function and position the mosque as the identity of *alun-alun*. The findings of this research are the functions of the Grand Mosque are closely related to the phenomenon of the Alun-Alun's development.

Keywords: Jami' Mosque, Kota Malang, development of function, *alun-alun*

Abstrak

Identik dengan kota-kota lainnya di Pulau Jawa, Kota Malang juga memiliki alun-alun di pusat kota yang dilengkapi dengan sebuah Masjid Jami' di sisi baratnya. Komposisi ini dengan jelas menunjukkan beberapa kemiripan dengan tipologi ibukota-ibukota yang ada di Pulau Jawa. Di samping kemiripan itu, terdapat pula perbedaan yang dimiliki oleh Alun-Alun Kota Malang. Alun-Alun kota ini tidak diletakkan sebagai orientasi utama dari pendopo sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, posisi dan fungsi Masjid Jami' secara dinamis mengikuti eksistensi Alun-Alun Kota Malang yang berkembang seiring dengan pertumbuhan kota ini. Karena itu, penelitian tentang hubungan posisional dan fungsional antara Masjid Jami' dan Alun-Alun ini dianggap penting untuk dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pengguna, analis, dan pengamat Alun-Alun ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai ide dari pendapat-pendapat mereka mengenai fungsi masjid ini. Sementara itu, data sekunder yang dikumpulkan adalah data historis mengenai perkembangan Alun-Alun Kota Malang dan Masjid Jami' tersebut, termasuk data pendirian dan perluasan Masjid Jami', terutama pada saat masjid ini berubah menjadi Masjid Agung Kota Malang. Data-data ini dibandingkan dengan fenomena yang muncul pada saat ini, keinginan-keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan komunitas dan masyarakat Kota Malang. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa posisi dan fungsi dari Masjid Agung Kota Malang ini terkait erat dengan fenomena perkembangan Alun-Alun Kota Malang.

Kata kunci: Perkembangan fungsi, Masjid Jami', Kota Malang, alun-alun

Latar Belakang: Alun-Alun Kota Malang dan Konsep Kota Tradisional di Pulau Jawa

Konsep tata kota tradisional Jawa, *Catur Tunggal*, memang tidak sepenuhnya diterapkan secara murni di Kota Malang. Hal itu terlihat dari posisi pendopo kabupaten di sisi timur (dan tidak menghadap alun-alun), yang berbeda dengan konsep kota tradisional Jawa yang menempatkan kantor kabupaten di sisi selatan alun-alun. Masjid Agung Kota Malang hingga saat ini menjadi satu-satunya elemen *catur tunggal* yang berada di posisi yang

sesuai konsep tersebut. Kenyataan tersebut menjadikan masjid ini sebagai sebuah artefak kota yang ikut membentuk keberadaan Alun-Alun Kota Malang sebagai ruang urban dari awal pendiriannya oleh Adipati Malang di tahun 1853, perluasan masjid oleh Belanda di tahun 1890, hingga saat ini. Atas posisinya tersebut, Masjid Agung -sebelumnya Masjid Jami'- yang didirikan sebelum alun-alun terbentuk pada tahun 1882 saat Malang masih berstatus kadipaten, mempunyai peranan penting bahkan dalam pemilihan lokasi alun-alun. Alun-alun

ini di kemudian hari berkembang dengan konsep *open space*.

Menurut Withkamp dalam Handinoto, tipologi ibukota kabupaten di Jawa memiliki tata kota yang didominasi oleh alun-alun yang terletak di pusat kota¹. Pada sumbu utara - selatan di kedua ujung alun-alun terletak kediaman Asisten Residen dan Bupati yang saling berhadapan. Di sebelah barat alun-alun terletak masjid, lengkap dengan tempat wudlu di depan, dan makam Jawa di sampingnya. Di samping kiri dan kanan dari masjid terdapat tempat tinggal penghulu, sedangkan di sisi sebelah timur terdapat losmen atau rumah biasa bersama dengan tempat tinggal orang-orang swasta Belanda, yang dalam masyarakat kolonial statusnya lebih rendah dari status pegawai negeri. Keberadaan masjid di sisi barat dan bangunan penting lain di sekitar alun-alun tersebut menurut Lisa Dwi Wulandari terkait dengan konsep alun-alun sebagai upaya untuk memadukan dua kepentingan ritual yang berpusat di keraton dan di masjid, sehingga ruang kota pada alun-alun lebih merupakan ruang urban sebagai pusat kegiatan ritual masyarakat².

Sementara itu, fenomena yang ada saat ini, perkembangan waktu, dan tuntutan kebutuhan-keinginan masyarakat pengguna menjadikan alun-alun sebagai ruang kota yang terus berkembang hingga mengaburkan identitasnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, kedudukan dan fungsi masjid dalam konteks urban pun menjadi ikut menyurut. Fenomena yang dapat diamati di Alun-alun Kota Malang saat ini adalah adanya kecenderungan untuk menjadikan alun-alun sebagai wadah bagi aktivitas masyarakat, seperti bersantai, duduk-duduk, mengobrol, berdagang, dan berolahraga. Fungsi-fungsi tersebut identik dengan proses perkembangan dan pembentukan *public plaza* dan *commercial plaza* pada bentukan ruang terbuka di Eropa. Desain terbaru Alun-Alun Kota Malang saat ini membuatnya sulit digunakan sebagai wadah bagi luapan jamaah masjid, sebagaimana konsep fungsi alun-alun tradisional Jawa semula.

Dengan demikian, secara lebih rinci objek penelitian ini adalah kedudukan fungsi Masjid Agung Kota Malang dalam pembentukan ruang kota (alun-alun). Mengingat, secara historis dalam perkembangannya, keduanya menunjukkan upaya saling melengkapi keberadaan masing-masing. Meskipun begitu, seiring perkembangan waktu terjadi pergeseran makna terhadap alun-alun, namun komposisi struktur tradisional masjid tersebut terhadap alun-alun masih bertahan. Keberadaan Masjid Agung tersebut merupakan bentuk persepsi masyarakat yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui fungsi Masjid Agung terhadap Alun-Alun Kota Malang.

Sebuah ruang kota secara fisik juga terbentuk oleh artefak-artefak kota yang membentuk ruang-

ruang tersebut. Peran sebuah bangunan publik yang menjadi artefak kota dalam pembentukan ruang kota pun akan dipengaruhi oleh persepsi pengguna. Karena keterkaitan ruang dan artefak, maka pergeseran fungsi salah satu dari di antaranya secara tidak langsung berpengaruh pada fungsi lainnya. Demikian pula yang terjadi pada Masjid Jami' ini terhadap Alun-Alun Kota Malang.

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah konsep kedudukan dan fungsi Masjid Agung terhadap Alun-alun Kota Malang. Secara historis (*historical approach*) juga ditelusuri faktor apakah yang mempengaruhi kedudukan dan fungsi Masjid Jami' ini terhadap Alun-Alun Kota Malang. Sementara itu, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menemukan hakikat dari gejala/fenomena masyarakat dalam menyikapi kedudukan dan fungsi Masjid Agung terhadap Alun-Alun Kota Malang.

Konsepsi Ruang Kota

Pada awalnya, kriteria dari sebuah ruang perkotaan (*urban space*), menurut Rob Krier adalah karakteristik geometrik dan nilai estetikanya³. Artinya, secara fisik ruang perkotaan merupakan suatu ruang luar yang dibatasi oleh berbagai macam bentuk fasade dan ketinggian massa (*elevation*) serta mempunyai nilai estetis yang dapat membuatnya diterima sebagai ruang kota (*urban space*). Namun, dalam perkembangan berikutnya sifat dan karakteristik ruang kota tidak hanya sebatas karakter fisik semata, sebagaimana dikemukakan Roger Trancik yang membagi dua tipe *urban space*, berdasarkan sifatnya, yaitu ruang dengan batas yang nampak (*hard space*) dan ruang dengan batas yang tidak nampak (*soft space*)⁴. Yang perlu diperhatikan sebagai komponen ruang dengan batas yang nampak (*hard space*) pada sebuah ruang kota adalah plasa (*square*), jalan, sifat ruang (terbuka atau tertutup), artikulasi permukaan ruang, skala ruang (monumental atau intim), serta fungsi komunikatif ruang. Sementara itu, komponen ruang dengan batas yang tidak nampak (*soft space*) merupakan komponen-komponen non-arsitekural atau alamiah yang juga harus diperhatikan, antara lain ruang hidup sosial manusia (*human space*) dan ruang alamiah seperti daerah pinggiran, bukit (*rural space*), dan taman-taman (*parklike space*). Ruang kota pun direspon oleh pengguna melalui runtutan aksi (*action in space*), mengembangkan persepsi (*perception of space*), menyusun konsepsi (*conception about space*) dan membentuk formasi (*formation through space*)⁵, yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian, perubahan sekecil apapun yang terjadi pada elemen fisik ruang kota pun pada akhirnya dapat mengubah aksi, persepsi, konsepsi, dan formasi ruang yang dibentuk.

Pengaruh Elemen-Elemen Islam di Kota Mataram Islam Jawa

Tata kota Mataram Islam menurut Markus Zahnd diketahui masih mengikuti tata kota Majapahit, dimana Masjid Agung menjadi elemen perkotaan yang tetap berada di tengah setiap kota⁶. Masjid selalu diletakkan di sisi barat alun-alun, dan biasanya mengikuti arah ortogonal lingkungan. Meskipun begitu, ada pula yang mengikuti arah yang tepat pada Ka'bah di Mekkah, misalnya Masjid Kauman di Yogyakarta. Di bagian belakang Masjid Agung berkembang kawasan Kauman sebagai elemen perkotaan baru selain alun-alun. Sementara itu, kelompok etnis yang lain membentuk kawasan khusus sesuai dengan nama komunitasnya, yaitu Pecinan, Kepatihan, dan Kebalen.

Sementara itu, Pieter Germeraad menyimpulkan bahwa ruang kota di Jawa sendiri dipengaruhi pula oleh susunan, fungsi serta nilai-nilai Islam dari Timur Tengah⁷. Meski demikian, bentuk dan struktur kota yang mengutamakan batas tegas antara fungsi publik dan privat tidak digunakan, baik pada bahan, konstruksi, maupun pada bentuk bangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara iklim tropis Asia Tenggara dengan iklim arid (panas dan kering) Timur Tengah. Pengaruh Islam yang lain, menurutnya terjadi melalui persepsi Islam terhadap perdagangan yang berbeda dengan zaman Jawa - Hindu. Perbedaan tersebut mempengaruhi ekonomi kota serta lingkungannya sebagai berikut:

- a. Batasan antara ekonomi, politik, dan agama yang ada sebelumnya kini dihapuskan, karena kegiatan ekonomi dan politik dilaksanakan juga di masjid. Sebaliknya, kegiatan agama juga dapat dilihat di tempat perdagangan/pasar.
- b. Batasan tajam antara fungsi-fungsi tempat tinggal, pekerjaan, lalu-lintas, kegiatan santai, dan sebagainya dihapuskan. Semua zona dan fungsi saling terkait.

Pengaruh pemanfaatan elemen-elemen Islam tersebut terhadap tata ruang kota di Jawa saat itu pun tidak berhenti pada aspek fisik ruang. Keyakinan bahwa kemakmuran seseorang dinilai bukan karena memiliki banyak materi, tetapi tergantung pada tingkat dan jumlah orang yang 'dimakmurkan' atau mendapatkan manfaat darinya juga memperkuat aspek morfologi kota-kota Jawa⁸. Berbagai bangunan atau rumah disusun sebagai sebuah kelompok dengan memprioritaskan relasi bangunan secara arsitektural.

Alun-Alun Kota Malang

Secara tipologi, alun-alun tradisional Jawa selalu terkait dengan keberadaan bangunan-bangunan publik di sekitarnya dalam konsep *Catur Tunggal*. Adanya masjid, pendopo kabupaten, kantor karesidenan, bahkan penjara kota menjadi

keniscayaan yang dapat ditemui di beberapa alun-alun tradisional di kota-kota kabupaten di Jawa. Meskipun Alun-Alun Kota Malang tidak menerapkan secara murni konsep alun-alun tradisional Jawa, tetap tidak dapat diabaikan adanya keterkaitan spasial dan fungsional antara alun-alun dan masjid agung tersebut. Konsep alun-alun saat itu dihadirkan sebagai upaya untuk memadukan dua kepentingan ritual yang berpusat di keraton dan di masjid. Dengan demikian, ruang kota pada alun-alun lebih merupakan ruang urban sebagai pusat kegiatan ritual masyarakat. Fakta sejarah tersebut menunjukkan adanya peran dan fungsi keduanya terhadap pembentukan ruang kota (*urban space*) di pusat Kota Malang.

Seiring dengan perkembangan kota, meningkatnya tuntutan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota, Alun-Alun Kota Malang berkembang menjadi ruang kota yang mendekati konsep *public plaza* dan *commercial plaza*. Alun-alun memang masih menjadi ruang publik, namun lebih ke arah sektor ritel dan sektor perdagangan informal. Urbanisasi, krisis moneter, kurang tersedianya kesempatan kerja di kota, dan revolusi ritel yang melanda kota-kota Indonesia semakin mengaburkan makna alun-alun. Kondisi serupa diyakini akan terjadi pula pada kedudukan sentral masjid agung, terutama pada peran sentralnya sebagai pembentuk ruang kota sebagaimana ketika alun-alun pertama kali dibangun.

Salah satu faktor indikasi perubahan tersebut adalah persepsi dan asumsi pengguna (*participant*) dan pengamat (*observer*), baik yang mengalami langsung setiap harinya atau yang melintas, maupun persepsi dari pengambil kebijakan kota. Persepsi dan asumsi yang muncul dari kedua kelompok tersebut sedikitnya dapat menunjukkan kedudukan dan fungsi Masjid Agung Kota Malang saat ini. Dengan mengetahui faktor perubahannya, diharapkan akan muncul tanggapan yang lebih kontekstual terhadap identitas Alun-Alun Kota Malang.

Pada awalnya alun-alun lebih dikenal sebagai sebuah lapangan terbuka di pusat kota kerajaan. Berdasarkan penguasa yang membentuk karakter *place* pada ruang terbuka tersebut, alun-alun dapat digolongkan ke dalam empat periodisasi, yaitu (1) Masa Hindu/Majapahit, (2) Masa kerajaan Islam dan penyebaran agama Islam, (3) Masa penjajahan Belanda (kolonial), dan (4) Masa Pasca-Kemerdekaan (orde lama-orde baru-orde reformasi)⁹. Rincian masing-masing periode adalah sebagai berikut:

1. Masa Hindu/Majapahit (abad VI - XIII M)

Pada masa Hindu/Majapahit telah dikenal adanya ruang terbuka. Meski tidak ditemukan bukti-bukti artefaknya, namun di dalam kitab-kitab sastra pada masa itu telah disebutkan keberadaan ruang

terbuka. Pengaruh kosmologi dalam agama Hindu turut membentuk komposisi struktur kota kerajaannya yang menentukan pembagian zona utara dan selatan, yang terbagi oleh adanya ruang terbuka dan jalan besar. Zona utara bersifat lebih profan, sedangkan sisi selatan merupakan zona sakral. Konsep ini dikenal dengan istilah *mikrokosmos dualistis*. Oleh karenanya, posisi pura/kerajaan dalam periode Hindu berada di sisi selatan. Selain itu, konsep ini menempatkan benda secara simetris, yang dimaksudkan untuk melambungkan keadaan harmonis atau kerinduan akan harmoni hal-hal yang bertentangan. Keadaan harmoni tersebut dicapai dengan pengadaan ruang suci dengan menerapkan konsep *mikrokosmos hirarkis* dalam tata bangunan dan tata ruang kota melalui sistem *Hasta Brata*¹⁰.

Di dalam kitab cerita pewayangan Hariwangsa, Baratayudha, Gatotkacasraya, Kresnayana, dan Bomakwya, telah digambarkan ibukota kerajaan (*nagara* atau *rajya*) yang memiliki kraton/istana kerajaan (*kadatwan*) dengan *wanguntur* (alun-alun) di depannya sebagai tempat untuk menyelenggarakan suatu permainan atau upacara kenegaraan. Sementara itu, di dalam kitab Negarakertagama karangan Empu Prapanca, disebutkan bahwa ibukota Majapahit terdiri dari beberapa kompleks bangunan yang dihubungkan dengan jalan raya. Tiap kelompok bangunan dikelilingi tembok tersendiri. Komplek bangunan terpenting adalah istana raja atau Kraton yang disebut *Pura*, kemudian tempat tinggal para bangsawan serta para pendeta agama yang disebut *Kuwu*. Di tengah kota terdapat jalan besar yang membagi kota menjadi utara dan selatan. Disebutkan setelah memasuki gerbang utama Pura Raja Hayam Wuruk, terbentangleh *wanguntur* sebagai halaman utama Kraton.

Wanguntur itu digambarkan berupa halaman yang sangat luas dan pada empat sisinya terdapat *watangan*, sedangkan di bagian tengah terdapat *witana*. *Watangan* adalah rumah atau bangunan tempat berkumpulnya para pendeta Siwa dan Budha berikut tempat tinggalnya. Sementara itu, *witana* yang berada di tengah halaman adalah pendopo besar tempat dilangsungkannya pesta-pesta kenegaraan¹¹. Dapat disimpulkan bahwa fungsi alun-alun saat itu adalah sebagai tempat untuk melaksanakan ritual keagamaan dengan keberadaan *watangan*, serta fungsi kenegaraan dengan adanya *witana*.

2. Masa kerajaan Islam dan penyebaran agama Islam (abad XII - XVI M)

Pada masa kerajaan Islam, komposisi utara - selatan pada masa Hindu masih menjadi rujukan. Namun, untuk makin memperkokoh alun-alun sebagai pusat kota kerajaan Islam, maka ditempatkanlah masjid di sisi barat dan keraton di sisi selatan. Alun-alun dan aktivitasnya berangsur

menjadi ciri keberadaan sebuah negara. Selain sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dan tokoh masyarakat untuk beribadah di hari Jum'at dan hari besar Islam lainnya, alun-alun juga menjadi tempat pelaksanaan upacara keagamaan dan kenegaraan. Upacara dan pesta kenegaraan dengan berbagai macam atraksi dan permainan menjadi daya tarik rakyat untuk memenuhi alun-alun. Selain sebagai tempat berlangsungnya upacara keagamaan dan pesta kenegaraan, alun-alun pada masa kerajaan Islam juga berkembang menjadi tempat terbuka bagi rakyat untuk tukar-menukar dan menjualbelikan produksi pertanian maupun industri rumah tangga mereka, hingga menyerupai sebuah pasar¹². Pasar yang dalam bahasa Jawa Kuno berarti tanah lapang akhirnya memang tidak dapat dipisahkan secara tegas dari alun-alun. Keberadaan pasar sebagai tempat kegiatan ekonomi ini hingga saat ini masih dapat disaksikan di alun-alun kerajaan Islam di Banten, Demak, Surakarta, dan Yogyakarta.

Pada masa penyebaran agama Islam selanjutnya, komposisi struktur kota kerajaan Islam ini ditiru pada kota-kota kabupaten baru dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Masa ini juga ditandai dengan masa transisi masuknya Belanda dengan menambahkan kantor pemerintahan adipaten di sisi selatan alun-alun kota.

3. Masa penjajahan Belanda/Kolonial (abad XV - XIX M)

Pada masa Kolonial Belanda, nuansa kepentingan politik kekuasaan makin kuat. Awalnya Belanda menambahkan kantor pemerintahan/Bupati atau Kanjengan di sisi selatan alun-alun dan mempertahankan keberadaan masjid di sisi barat alun-alun. Berikutnya berturut-turut berdiri kantor Asisten Residen di sisi utara saling berhadapan dengan kantor Bupati. Sebelah barat alun-alun terdapat masjid lengkap dengan tempat wudlu di depan dan makam di sampingnya. Samping kiri dan kanan masjid terdapat tempat tinggal penghulu. Ada juga barak polisi militer dan penjara di sisi timur. Terdapat pula losmen atau rumah biasa bersama dengan tempat tinggal orang-orang swasta Belanda, yang dalam masyarakat kolonial statusnya lebih rendah dari status pegawai negeri. Di sebelah pojok barat alun-alun, di seberang Kantor Asisten Residen terdapat kamar bola, klub orang-orang Belanda. Di sekeliling alun-alun juga terdapat antara lain rumah sakit, tempat tinggal pejabat penting, seperti pegawai pajak, hakim, dan sebagainya¹³.

4. Masa pasca kemerdekaan/Orde Lama - Orde Baru - Orde Reformasi (Abad XX M)

Pada masa pasca kemerdekaan, kondisi sosial politik ekonomi negara yang pasang surut ikut mempengaruhi bentukan alun-alun. Pada masa pemerintahan orde lama nuansa politik lebih

menonjol. Alun-alun menjadi tempat unjuk kekuasaan partai-partai dan gerakan-gerakan politik. Rapat-rapat besar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan kerumunan rakyat berlangsung di alun-alun. Alun-alun menjadi ruang politik yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan; fungsi yang kemudian mengalir ke jalanan kota. Sementara itu, pada masa Orde Baru, gelombang urbanisasi, pertumbuhan ekonomi yang timpang dan puncaknya pada krisis ekonomi turut berpengaruh pada bentukan alun-alun. Meningkatnya sektor informal akibat krisis ekonomi di perkotaan turut mengubah fungsi alun-alun sebagai ruang terbuka untuk berdagang. Di sisi lain, revolusi ritel yang melanda kota-kota di Indonesia semakin menciptakan budaya konsumerisme dan menumbuhkan peluang bagi investor untuk menghadirkan pusat kegiatan ekonomi (ritel) di sekitar alun-alun. Kondisi inilah yang kian menggeser fungsi alun-alun menjadi ruang ekonomi.

Sementara itu, pada masa orde reformasi, kekuatan ritel dan sektor informal yang telah bersinergi sebelumnya, pada akhirnya mengembalikan fungsi alun-alun sebagai tempat berkumpulnya warga kota, meski dalam konteks berbeda, yaitu konteks ekonomi. Ketika krisis ekonomi berangsur membaik, sektor informal mulai diatur dan berangsur dialihkan dari alun-alun. Kondisi ini turut mengubah fungsi alun-alun menjadi ruang terbuka kota dengan konsep *public plaza* dengan aktivitas sosial masyarakat.

Secara *diagramatis-historis* perkembangan alun-alun dapat disusun ringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Konsep Alun-Alun Jawa

Masa	Konsep Alun-Alun
Masa kerajaan Hindu (Abad VI M)	Sebuah jalan besar yang membagi dua pusat kota kerajaan, Utara dan Selatan, dengan posisi Pura/kerajaan di sisi selatan dan wanguntur (alun-alun) di depannya.
Masa kerajaan Islam dan masa Penyebaran Islam (Abad XIII-XVI M)	Menggunakan Konsep kerajaan Hindu dengan Kosmologi Utara-Selatan- Kraton di selatan dan Masjid di Barat. Bagian profan di utara dan alun-alun di tengahnya.
Masa Kolonial Belanda (Abad XV-XIX M)	Mengkreasikan tiruan alun-alun tradisional atau melengkapi alun-alun masa penyebaran agama islam dengan menambahkan kantor kabupaten/ Kanjengan, sebagai symbol kekuasaan. Berturut-turut fasilitas pemerintahan Belanda lain.
Masa Pasca Kemerdekaan (Abad XX M)	Konsep Alun-alun dipengaruhi oleh kondisi politik (orde lama), ekonomi (orde baru), kondisi sosial (orde reformasi). Kekuatan ritel dan sektor informal turut menggeser fungsi dan makna alun-alun

(Sumber: Hasil Analisis)

Masjid Agung Malang dan Perkembangan Alun-Alun Kota Malang

Masjid Agung Kota Malang merupakan tempat ibadah tertua yang tumbuh seiring dengan perkembangan Kota Malang jauh sebelum wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kolonial Belanda, tepatnya ketika Malang masih di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Masjid Agung tersebut sejak awal berdirinya (1853) tidak terlepas dari pembentukan Alun-Alun Kota Malang. Seiring dengan perkembangan Kota Malang, pada tahun 1882 dibangunlah sebuah alun-alun yang lokasinya dipilih berdasarkan keberadaan Masjid Jami' yang dibangun saat Malang masih berstatus Kadipaten. Fakta sejarah ini menunjukkan peran sentral masjid agung dalam pembentukan ruang kota.

Alun-Alun Kota Malang dan sekitarnya yang sudah ada sejak tahun 1882¹⁴ secara garis besar mirip dengan tipologi alun-alun kota kabupaten di Jawa. Walaupun begitu, perletakan bangunan penting seperti pendopo Kabupaten tidak berhadapan dengan kantor Asisten Residen. Letak kantor Assisten Reside adalah di sisi selatan alun-alun, sedangkan kantor kabupaten terletak di sebelah timur dari alun-alun dan tidak menghadap ke alun-alun, tetapi menghadap ke selatan, yaitu *Regenstraat* (sekarang jalan H. Agus Salim). Hal ini jelas menyalahi prinsip dasar tata letak bangunan pada kota kabupaten di Jawa. Secara diagramatis perkembangan Alun-Alun dan Masjid Agung Kota Malang dapat digambarkan secara singkat di dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Alun-Alun dan Masjid Agung Kota Malang

Masa	Perkembangan Alun-Alun dan Masjid Agung Kota Malang
Masa Prakolonial 1767	Alun-alun masih berupa lapangan terbuka berbentuk kotak persegi dengan pohon beringin sebagai pusatnya. Merupakan pusat permukiman pribumi yang berada di sebelah kanan sungai Brantas.
1822	Alun-alun diperbarui Belanda setelah menduduki Kota Malang, untuk kepentingan Belanda sebagai pusat kekuasaan administrasi, pusat kontrol atas produksi, dan kekuasaan politis Belanda.
1850-1853	Masjid Jami' dibangun Belanda sebagai alat kontrol masyarakat Muslim, yang diabadikan pada prasasti pendirian masjid. Masjid beratap tumpang tiga berdenah bujur sangkar dengan serambi di sekeliling. Di sebelah kiri masjid terdapat kolam atau kolam tempat wudlu.
1882	Alun-alun Kota Malang selesai dibangun. Alun-alun berubah fungsi dari <i>social</i> menjadi <i>civic centre</i> . Pola permukiman di sekelilingnya terbentuk atas dasar pengelompokan dari masyarakat majemuk.

Masa	Perkembangan Alun-Alun dan Masjid Agung Kota Malang
1890	Masjid Jami' mengalami perluasan dengan penambahan bangunan di sebelah barat. Bangunan baru beratap tumpang dua, yang dilengkapi <i>pawestren</i> . Ruang mihrab bangunan lama pindah ke bangunan baru. Pembangunan diprakarsai oleh Bupati H.Djoyodiningrat.
1897-1903	Malang mempunyai trem yang melintasi alun-alun jurusan Kota Lama - Dampit dan Belimbing - Tumpang.
Masa Kotapraja 1914-1916	Peningkatan sarana dan prasarana dan penataan alun-alun. Pendirian Javasche Bank dan Palace Hotel.
1920-1930	Sebelah timur masjid dibangun serambi bergaya klasik yang juga dilengkapi sepasang menara pendek berketinggian dua lantai yang berdenah segi delapan
Masa Orde lama- masa kotamadya 1940-an	Alun-alun berkembang menjadi ruang aktif yang dimanfaatkan masyarakat untuk menjual bunga "tempoe doeloe" dan menempati sudut utara alun. Hal ini menambah keindahan dan hiburan bagi masyarakat.
1950-an	Masjid Jami' berubah menjadi masjid agung dengan perluasan tempat wudlu di dekat kolah, dan dibangun ruang pertemuan dan administrasi masjid.
Masa orde baru - masa kotamadya (otonomi) 1970-an	Alun-alun kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, sehingga masyarakat leluasa menggunakan untuk aktivitas beragam, mengesankan kekumuhan dan rawan kejahatan. Adanya pos-pos di sudut alun-alun.
1982-1983	Renovasi besar-besaran atas alun-alun karena kekumuhan dengan perkerasan, <i>sitting group</i> , lampu taman, pemindahan aktivitas upacara ke Stadion Gajayana, dan penebangan pohon beringin berganti kolam air mancur.
1992	Alun-alun belum terpagari, terdapat SPBU di sisi utara alun-alun. Pusat alun-alun berupa kolam air tanpa air mancur, tanpa bangunan permanen di sekitarnya.
1998	Sekeliling alun-alun telah berpagar, SPBU dibongkar, dan penempatan air mancur di pusat alun-alun. Kondisi di sekitar alun-alun dipenuhi PKL, baik asongan maupun bedak semipermanen. Aktivitas perniagaan di alun-alun meningkat. Muncul terminal bayangan di sisi barat.
Masa reformasi - masa kota 1999-2005	Masjid Agung mengalami renovasi serambi kiri menjadi dua lantai. Serambi bangunan bergaya timur tengah dengan penampilan gerbang beratap kubah dan atap dak beton. Menara lebih langsing, tinggi dengan atap kubah. Perluasan mengambil pula daerah bekas makam yang telah dipindahkan berdasarkan musyawarah ulama ke sisi belakang.
1999-2000	Puncak kesemrawutan alun-alun yang makin bergeser fungsinya ke arah perniagaan hingga mengurangi dimensi alun-alun untuk parkir kendaraan wisata, PKL, terminal bayangan dan berkurangnya dimensi untuk pejalan kaki.

Masa	Perkembangan Alun-Alun dan Masjid Agung Kota Malang
2001-2007	Dilakukan penertiban PKL di sekeliling alun-alun (memindahkan ke sekitar stasiun tugu) serta penambahan gerbang di sisi timur, peninggian bagian tengah alun-alun, penempatan burung dara.

(Sumber: Hasil Analisis)

Fenomena ruang kota yang terjadi pada Alun-Alun dan Masjid Agung Kota Malang yang berhasil direkam secara visual tersaji sebagai berikut:

a. Masa Prakolonial

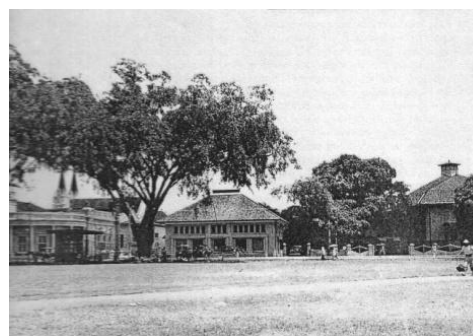


Gambar 1. Alun-alun berupa lapangan terbuka dengan pohon-pohon Beringin (Sumber: van Schaik¹⁵)

b. Masa Kolonial



Gambar 2. Alun-alun dilintasi jalur trem jalur Kota Lama-Dampit dan Belimbing-Tumpang (Sumber: van Schaik)

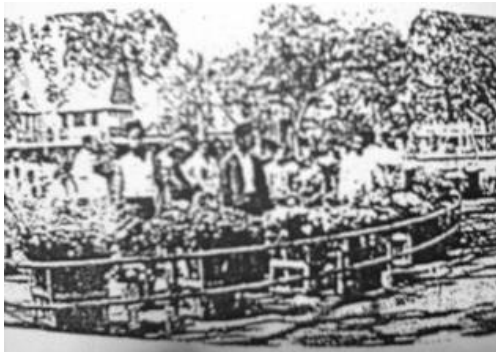


Gambar 3. Alun-alun dilengkapi fasilitas publik lainnya (bank, hotel). Jalur trem ditutup, menjadi perlintasan pejalan kaki. (Sumber: van Schaik, 1996)



Gambar 4. Masjid Jami' dibangun dengan atap tumpang tiga dan diperluas di bagian barat dengan atap tumpang dua (1850-1853). (Sumber: van Schaik)

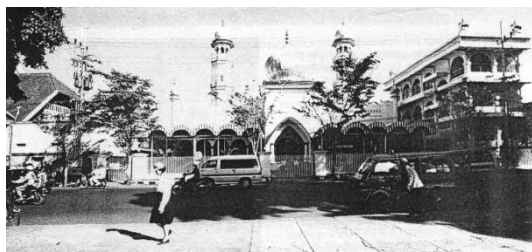
c. Masa Orde Lama



Gambar 5. Alun-alun makin berkembang menjadi ruang aktif masyarakat menjual bunga sehingga menarik perhatian masyarakat (Sumber: Handinoto¹⁶)



Gambar 6. Pohon beringin di tengah telah berganti kolam air, jalur pedestrian dibuat, *sitting group*, lampu taman, pagar dan area parkir kendaraan wisata, bahkan SPBU pernah dibuat di era ini. (Sumber: van Schaik)



Gambar 7. Masjid Jami', mengalami renovasi besar-besaran dengan penambahan lantai dua serambi kiri untuk administrasi, memperkuat batas masjid. Atap tumpang tiga tertutup/diganti kubah beton dan atap dak dan menara lebih langsing (struktur beton) (Sumber: van Schaik)

d. Masa Reformasi



Gambar 8. Dengan penambahan air mancur di tengah, burung dara, alun-alun makin berkembang menjadi publik plaza dengan peninggian bagian tengah.



Gambar 9. Masjid agung pun makin 'terlihat menonjol' dengan menara lebih tinggi, penambahan lantai 2 dan gerbang dengan atap kubah yang menjulang. Meski demikian, pada hari jum'at dan hari besar, jalanan dan sisi barat alun-alun depan masjid menjadi area pasar dadakan, lebih dari luapan jamaah.

e. Tahun 2009



Gambar 10. Masjid Agung dilihat dari alun-alun, makin terpisah antara satu lainnya

Penutup

Kedudukan dan Fungsi Masjid Jami' atau Masjid Agung terhadap Alun-Alun Kota Malang berdasarkan penelusuran sejarah dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Faktor Politik. Di masa awal, Masjid Jami' digunakan sebagai salah satu fungsi kontrol Pemerintah Kolonial Belanda terhadap masyarakat Muslim khususnya dan masyarakat umumnya di pusat pemerintahan sekitar alun-alun. Di masa berikutnya Masjid Jami'

dikembangkan menjadi salah satu upaya penguasa lokal untuk menunjukkan kekuasaannya (Masjid Agung). Perubahan mendasar adalah perubahan bentuk atap utama masjid, dan pergeseran ruang mihrab.

- b. Faktor Ekonomi. Seiring dengan perkembangan alun-alun, Masjid Jami' pun mengalami perluasan dan pengembangan. Ketika alun-alun menjadi ruang aktif ekonomi masyarakat, maka secara keruangan Masjid Jami' memerlukan perluasan dan pengembangan fasilitas baik berupa tempat wudlu, ruang pertemuan, dan administrasi masjid. Krisis ekonomi yang terjadi sekitar tahun 1990-an yang memicu kekumuhan pada kondisi alun-alun, dan peningkatan intensitas kegiatan serta fasilitas perdagangan di sekitar alun-alun juga berimbas dengan pola keruangan Masjid Jami' melalui pemanfaatan halaman masjid dan jalan sebagai area limpahan jamaah. Lebih dari itu, di waktu-waktu tertentu jalan di depan masjid bahkan menjadi pasar dadakan yang melayani jamaah.
- c. Faktor Keagamaan. Ketika alun-alun tidak lagi menanggung beban sebagai tempat perpaduan kepentingan ritual pendopo dan masjid, dan berangsur menjadi *public plaza* maka Masjid Jami' atau Masjid Agung mulai menunjukkan kedudukan sentralnya sebagai tempat ibadah/keagamaan kota dengan keberadaan desain menara ganda, tinggi bangunan, dan bentuk atap utama masjid.

Adanya perubahan persepsi Islam yang berbeda dengan masa Jawa-Hindu di masa awal pembangunannya menyebabkan batas-batas politik, ekonomi, dan keagamaan pada tempat ibadah dan ruang kota mulai dihapuskan. Dengan demikian, secara politis, ekonomis, dan religi pula, kedudukan dan fungsi Masjid Agung terus terkait dengan perkembangan alun-alun. Perubahan ini pula yang pada akhirnya mempengaruhi bentuk fisik dan keruangan Masjid Agung Kota Malang.

Referensi

- 1 Handinoto & Paulus H. Soehargo. 1996. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*. Yogyakarta: Andi Offset. h. 20.
- 2 Lisa Dwi Wulandari. 2007. *Konsep Metafora-Ruang Pada Ruang Terbuka Perkotaan. Studi Kasus: Alun-Alun Kota Malang*. Disertasi S3, ITS Surabaya. h. 41.
- 3 Rob Krier. 1979. *Urban Space*. London: Academy Editions. h.15-22
- 4 Roger Trancik. 1986. *Finding Lost Spaces*. New York: Van Nostrand Reinhold Company. h. 60-96
- 5 DJ. Walmsley dalam Ali Madanipour. 1996. *Design of Urban Space: An Inquiry into a socio-*

spatial process. Chichester: John Wiley & Sons. h. 65

- 6 Markus Zahnd. 2008. *Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius. h. 27
- 7 Pieter W. Germeraad dalam Markus Zahnd. 2008. *Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius. h. 28
- 8 Surjadi Santoso dalam Markus Zahnd. 2008. *Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius. h. 29
- 9 R. Siti Rukayah. 2005. *Dari Nilai Historis ke Ruang Ekonomi: Sebuah Studi Lapangan Kota di Indonesia*. Semarang: BP UNDIP. h. 16
- 10 Lisa Dwi Wulandari. 2007. *Konsep Metafora-Ruang Pada Ruang Terbuka Perkotaan. Studi Kasus: Alun-Alun Kota Malang*. Disertasi S3, ITS Surabaya. h. 40
- 11 Eko Punto Hendro. 2001. *Kraton Yogyakarta Dalam Balutan Hindu*. Yogyakarta: Penerbit Bendera
- 12 A. Bagus P. Wiryomartono. 1995. *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka. h. 46
- 13 Handinoto. 1996. *Perkembangan Kota Malang Pada Jaman Kolonial (1914-1940)*. Yogyakarta: Andi Offset. h.20
- 14 Kepala Daerah propinsi Tingkat I Jawa Timur. 1964. *Kotapraja Malang 50 Tahun*. h.12
- 15 A. van Schaik. 1996. *Malang: Beeld van een stad*. Nederland: Asia Mayor
- 16 Handinoto. 1996. *Perkembangan Kota Malang Pada Jaman Kolonial (1914-1940)*. Yogyakarta: Andi Offset